

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
(Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

**SAFIRA GHASSANI ZATALINA
NPM 2156021016**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH

(Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung)

Oleh

SAFIRA GHASSANI ZATALINA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor di perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 2 variabel independent yaitu independensi dan komitmen organisasi serta 1 variabel dependen yaitu kinerja auditor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pemerintah di perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner online melalui *Google Form*. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS ver 27. Metode analisis yang digunakan adalah uji prasyarat instrument, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dan juga independensi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Kata Kunci : Independensi, Komitmen Organisasi, Kinerja Auditor

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL INDEPENDENCE AND COMMITMENT ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT AUDITORS (Study on BPKP Representative of Lampung Province)

By

SAFIRA GHASSANI ZATALINA

This study aims to determine the influence of organizational independence and commitment on the performance of auditors in BPKP representatives in Lampung Province. The type of research method used in this study is quantitative with 2 independent variables, namely independence and organizational commitment and 1 dependent variable, namely auditor performance. The population in this study is all government auditors in the BPKP Lampung Province representatives. The instrument used in this study is an online questionnaire through Google Form. The statistical tool used in this study is SPSS ver 27. The analysis methods used are instrument prerequisite test, multiple linear regression analysis, classical assumption test, and hypothesis test. The results of this study show that the independence variable partially has a significant effect on the auditor's performance, organizational commitment partially has a significant effect on the auditor's performance and also the independence and organizational commitment simultaneously affect the auditor's performance.

Keywords : Independence, Organizational Commitment, Auditor Performance

**PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
KINERJA AUDITOR PEMERINTAH
(Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung)**

**Oleh
SAFIRA GHASSANI ZATALINA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (STUDI PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Safira Ghassani Zatalina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156021016**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Himawan Indrajat, S.IP., M.Si
NIP 198307272009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tabah Maryanah', is written over the printed name and NIP of the Dean of the Faculty of Social and Political Sciences.

Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001

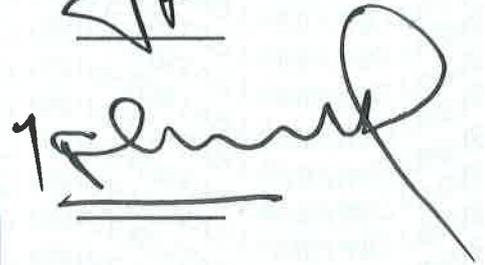
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Himawan Indrajat, S.IP., M.Si



Penguji Utama : Prof. Dr. Syarif Makhya, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2025
Yang Membuat Pernyataan



Safira Ghassani Zatalina
NPM 2156021016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Safira Ghassani Zatalina lahir di Bandar Lampung pada tanggal 7 maret 2003, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Seprudin dan Oktarini. Peneliti memiliki adik bernama Anantha Farhan Zahran. Jenjang pendidikan penulis dimulai di TK Pertiwi Provinsi Lampung, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 2 Palapa dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 9 Bandar Lampung, dan diselesaikan pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMAN 1 Bandar Lampung dan berhasil diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung, penulis diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

MOTTO

Allahumma yassir wala tu'assir rabbi tammim bil khair

”Ya Allah, permudahkanlah (urusanku) dan janganlah persulit. Tuhanku,
sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan”

Semua yang tlah diberikan olehnya, pasti ada rencana yang indah

Dan tak perlu merasa gelisah, bersyukurlah dan berserah

- Rumah Sakit -

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada :

Kedua orang tua ku tercinta, Ayah Seprudin dan Bunda Oktarini yang telah merawat dan membesarkanku, menjadi saksi dalam perjuanganku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu mendukung apapun keputusanku. Terimakasih juga karena tidak pernah henti mendoakan ku dari kecil hingga sekarang.

Terimakasih untuk semua orang terdekotku yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Independensi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
7. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen Penguji Utama atas kesediannya untuk memberikan masukan dan saran-saran dalam proses penyelesaian skripsi;
9. Alm. Bapak Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Dosen Terfavorit, Terimakasih atas setiap canda tawa nya setiap mengajar di kelas, Al Fatihah untuk pak denden;
10. Ibu Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses pemilihan judul skripsi;
11. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Peneliti;
12. Seluruh pihak Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Terimakasih telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian;
13. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda ku yang sangat saya sayangi. Terimakasih untuk selalu mendoakan, menemani, selalu mengerti keadaanku dan selalu support apapun keputusanku. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang di alami selama ini tanpa campur tangan, do'a, ridho dan dukungan dari kalian berdua.
14. Adikku tersayang, Anantha Farhan Zahran. Terimakasih karena telah menjadi saksi bisu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, Terimakasih juga selalu menemaniku dan memberikan semangat dalam menjalani skripsi ini.
15. Kajut, Om Ferry, Tante Irma, Om Rio , Gathan, Ayang, dan Lula. Terimakasih untuk keluargaku yang selalu memberiku semangat,selalu membanggakan ku dan selalu menjadikanku panutan;
16. Rizky Armanda Putra. Terimakasih atas segala bentuk perhatian, dukungan dan saran kepada penulis. Dan selalu membersamaiku sejak SMA, memberikan

banyak semangat dan cinta, juga selalu mensupport segala hal yang ku lakukan. Terima kasih juga selalu siap mendengarkan keluh kesahku;

17. Uniku Rima Aisyah. Terimakasih untuk segalanya dan untuk selalu bisa di andalkan sedari kecil,selalu menyemangati, dan selalu membantuku dalam menjalani skripsi ini;
18. Audy, Raka dan Jano "*Siblings*". Terimakasih telah memberikan banyak semangat untukku dalam menjalankan skripsi ini;
19. Kakakku Ayu Gusti Padira. Terimakasih sudah mendengarkan segala keluh kesahku, selalu membantu dan selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini;
20. Michelle Nabita Yosefin teman SMP ku . Terima kasih untuk selalu menemaniku dan menjadi pendengar yang baik untuku sedari dulu. Terima kasih juga untuk pertemanan kita yang masih berjalan, dan akan terus berjalan;
21. Teman-teman SMA ku Sipa, Karin, Sesa. Terima kasih untuk selalu menemaniku, dan memberikan support. Terima kasih juga untuk pertemanan kita yang masih berjalan, dan akan terus berjalan;
22. Sisy Pristhysila temanku yang selalu kebersamai sedari maba. Terimakasih sisy untuk canda,tawa, kejahilan,gombalan dan pelukan hangat yang selalu mewarnai hari-hariku, dan selamat kembali pulang ke kota asal untuk sisy;
23. Kak na dan Kak tan. Kedua kakakku Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis semasa perkuliahan, selalu bertukar cerita dan saling memberikan saran. Terima kasih juga untuk pertemanan kita yang masih berjalan, dan akan terus berjalan;
24. Irma dan Viona. Terimakasih sempat menemani hari-hari penulis pada masa perkuliahan, walau tidak lagi bersama semoga kalian sehat selalu.
25. Selebrasi, terutama Zahdir, Terimakasih ya jah atas semua canda tawa dan perkataan perkataan istimewa yang selalu mewarnai pertemanan kita.
26. Geng maksi Anida dan Della. Terimakasih sudah mengisi hari-hari selama magang dan selalu saling menyemangati. Terima kasih juga untuk pertemanan kita yang masih berjalan, dan akan terus berjalan;

27. Teman-teman kuliahku Ira, Biya, Vania, Rachel. Terimakasih untuk pertemanan kita yang masih berjalan, dan akan terus berjalan;
28. Dan, semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang jika nama nya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungan, bimbingan, masukan, dan arahannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dan Saudara semua dengan pahala yang berlimpah.

Bandar Lampung, 23 April 2025

Penulis

Safira Ghassani Zatalina

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Penelitian Terdahulu	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Atribusi.....	15
2.2 Independensi	18
2.2.1 Definisi Independensi	18
2.2.2 Indikator Independensi Auditor.....	20
2.2.3 Aspek Independensi.....	20
2.2.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi Independensi	20
2.3 Komitmen Organisasi	22
2.3.1 Definisi Komitmen Organisasi	22
2.3.2 Dimensi Komitmen Organisasi	23
2.3.3 Faktor – faktor Komitmen Organisasi.....	23
2.4 Kinerja Auditor	24
2.4.1 Definisi Kinerja Auditor	24
2.4.2 Faktor – faktor Kinerja Auditor.....	25
2.5 Hubungan Teori Atribusi dengan Independensi dan Komitmen Organisasi .	26
2.6 Kerangka Berpikir.....	28
2.7 Hipotesis Penelitian	29

III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.2.1 Tempat Penelitian.....	30
3.2.2 Waktu Penelitian.....	30
3.3 Variabel Penelitian.....	31
3.4 Populasi.....	31
3.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	32
3.5.1 Definisi Konseptual	32
3.5.2 Definisi Operasional.....	33
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.6.1 Data Primer.....	36
3.6.2 Data Sekunder	37
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7.1 Skala Pengukuran Variabel	37
3.8 Uji Prasyarat Instrumen.....	38
3.8.1 Uji Validitas.....	38
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	39
3.9 Teknik Analisis Data	40
3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.9.2 Uji Asumsi Klasik	41
3.9.2.1 Uji Normalitas	41
3.9.2.2 Uji Multikolinearitas	41
3.9.2.3 Uji Heteroskedestisitas	41
3.9.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
3.9.4 Uji Hipotesis	42
3.9.4.1 Uji T (Parsial)	42
3.9.4.2 Uji F (Simultan).....	43
3.9.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R ²).....	44
IV. GAMBARAN UMUM	45
4.1 Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	45
4.2 Pengertian BPKP	48
4.3 Visi, Misi dan Tujuan BPKP	49
4.4 Tugas dan Fungsi BPKP	49
4.5 Struktur Organisasi BPKP	51
4.5.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	52

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	54
5.1.1 Karakteristik Responden	54
5.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
5.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	55
5.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ...	55
5.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	56
5.1.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang.....	57
5.1.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja	57
5.1.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden	58
5.1.2.1 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Independensi (X1).....	59
5.1.2.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Komitmen Organisasi (X2).....	61
5.1.2.3 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kinerja Auditor (Y)...	63
5.2 Hasil Uji Prasyarat Instrumen.....	65
5.2.1 Hasil Uji Validitas	65
5.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	66
5.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	67
5.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	67
5.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	68
5.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69
5.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	71
5.5 Hasil Uji Hipotesis.....	72
5.5.1 Hasil Uji t (Parsial).....	72
5.5.2 Hasil Uji F (Simultan)	73
5.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	75
5.6 Pembahasan.....	75
5.6.1 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor	75
5.6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor.....	78
5.6.3 Pengaruh Independensi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor.....	81
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	84
6.1 Simpulan	84
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPKP.....	51
Gambar 2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	52
Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia pada tahun 2019-2023	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3 Data Jumlah Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	32
Tabel 4 Definisi Operasional Variabel	33
Tabel 5 Pengukuran Skala Likert	38
Tabel 6 Kriteria Koefisien Korelasi	44
Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	55
Tabel 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	55
Tabel 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	56
Tabel 11 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang	57
Tabel 12 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja	58
Tabel 13 Kategori Mean	59
Tabel 14 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Independensi	59
Tabel 15 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Komitmen Organisasi	61
Tabel 16 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kinerja Auditor	63
Tabel 17 Hasil Uji Validitas	65
Tabel 18 Hasil Uji Reliabilitas	67
Tabel 19 Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 20 Hasil Uji Multikolinieritas	69
Tabel 21 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71
Tabel 22 Hasil Uji t (Parsial)	73
Tabel 23 Hasil Uji F (Simultan)	74
Tabel 24 Hasil Uji R ²	75

DAFTAR SINGKATAN

BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
IWC	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
KAP	: Kantor Akuntan Publik
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PABU	: Prinsip Akuntansi Berlaku Umum
IPP	: Instansi Pemerintah Pusat
APD	: Akuntabilitas Pemerintah Daerah
AN	: Akuntan Negara
P3A	: Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas keuangan negara. Didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pengawasan keuangan, BPKP bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di berbagai tingkatan. Melalui berbagai kegiatan seperti audit, evaluasi, dan investigasi, BPKP memastikan penggunaan keuangan negara secara efektif, efisien, dan akuntabel. Lingkup pengawasan BPKP sangat luas, mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga pembangunan nasional. Dengan demikian, BPKP berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya penyimpangan serta kerugian negara.

Tujuan utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Melalui berbagai kegiatan pengawasan seperti audit, evaluasi, dan investigasi, BPKP berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara. Lingkup pengawasan BPKP mencakup berbagai sektor, mulai dari pusat hingga daerah, serta berbagai aspek pembangunan nasional. BPKP merupakan auditor pemerintah. BPKP merupakan badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif negara (presiden), yang bertugas untuk mengawasi dana guna penyelenggaraan pembangunan negara yang dilakukan pemerintah dan bertanggung jawab atas tugasnya pada pemerintah dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Visi BPKP adalah

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Menurut Wati et.al (2010) menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan.

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditujukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku. BPKP perlu didukung oleh kinerja auditornya. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hasibuan (2009) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.

Auditor mampu dikatakan profesional dilihat dari kinerja yang dilakukannya dalam menjalankan perintah atasan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan kode etik auditor. Tuntutan masyarakat yang menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggung jawab auditor pemerintah, masyarakat sebagai penilai kinerja pemerintah menginginkan adanya sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan pemerintah yang baik agar pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain. Sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri.

Tentunya dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit, Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan standar audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriah dkk, 2009).

Dalam Lima tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Berdasarkan data dari Indonesia

Corruption Watch (IWC) jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia pada tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber : nasional.kompas.com

Berdasarkan dari tabel 1 di atas terlihat bahwa jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan setiap tahunnya, Hal ini menunjukkan adanya masalah yang mengkhawatirkan dalam praktik korupsi, yang dapat berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Peningkatan jumlah kasus ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya pencegahan yang lebih efektif untuk menekan angka korupsi di masa mendatang.

Maka dari itu tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. Maka dari itu BPKP khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai auditor internal pemerintah berperan penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi.

Auditor BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Karena tugasnya yang mendorong upaya pemberantasan korupsi tersebut maka sudah seharusnya auditor BPKP bekerja secara profesional dengan mematuhi kode etik dan standar audit yang berlaku serta memiliki komitmen untuk bekerja secara penuh di dalam organisasi namun tetap menjunjung independensi. Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998 dalam Efendy, 2010).

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia juga harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia juga harus dipersepsikan di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi

masyarakat inilah yang tidak mudah memperolehnya artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya menurut Mulyadi (2002).

Nirmala (2013), auditor yang independen adalah yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya. Auditor yang independen akan memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa sehingga jaminan atas keandalan laporan yang diberikan dapat dipercaya pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor yang benar-benar independen tidak akan terpengaruh oleh siapapun, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas audit yang baik menunjukkan bahwa auditor memiliki kinerja yang baik.

Profesionalisme auditor sendiri harus ditunjang dengan komitmen seseorang terhadap organisasinya. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal, Komitmen lebih kepada kesadaran dan kepedulian terhadap tujuan organisasi yang dipandang sebagai tujuan bersama. Yousef (2000), dalam Arifah, 2012 menyatakan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, di mana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi tinggi, adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik. Komitmen lebih kepada kesadaran dan kepedulian terhadap tujuan organisasi yang dipandang sebagai tujuan bersama. Dari sudut pandang ini, komitmen akan berbeda dengan motivasi, karena motivasi lebih

merupakan dorongan karena adanya manfaat atau imbalan tertentu yang diharapkan akan diperoleh (Sujana, 2012).

Sedangkan komitmen organisasi pada dasarnya merupakan suatu hubungan antara anggota dengan organisasi, misalnya hubungan antara auditor dengan kantor dimana ia bekerja. Hubungan yang baik akan timbul apabila auditor memiliki kesetiaan dan mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi. Komitmen organisasi dipengaruhi juga oleh profesionalisme auditor dan juga berdampak pada kinerja auditor. Akan timbul apabila auditor memiliki kesetiaan dan mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi. Komitmen organisasi dipengaruhi juga oleh profesionalisme auditor dan juga berdampak pada kinerja auditor.

Lalu Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Kinerja BPKP sebagai internal auditor pemerintah diukur dari seberapa banyak nilai tambah dan manfaat yang diterima oleh para *stakeholders*. Hasil pengawasan BPKP haruslah dapat merumuskan rekomendasi berupa serangkaian langkah perbaikan pengendalian manajemen untuk dipertimbangkan oleh para *stakeholders* yang terkait dalam mewujudkan *good governance*. Kinerja auditor adalah kemampuan dari seorang auditor menghasilkan temuan atau hasil pemeriksaan dari kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan dalam satu tim pemeriksaan (Yanhari, 2007).

Audit Pemerintah, khususnya Audit Kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kepada rakyat. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi

operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait (Ritonga, 2013). Menurut Prajitno (2012) kinerja auditor perlu diberikan perhatian secara serius karena menjadi perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ?
3. Apakah Independensi dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Independensi terhadap kinerja auditor pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Independensi dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

- Penelitian ini dapat memperbanyak literatur yang ada mengenai pengaruh independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor, khususnya di sektor pemerintahan.
- Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah, atau memperluas cakupan dengan variabel lain.

Manfaat Praktis :

- Bagi BPKP Provinsi Lampung, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja auditor melalui peningkatan independensi dan komitmen organisasi. Ini dapat mendorong peningkatan kualitas audit di sektor publik.
- Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi manajemen BPKP mengenai pentingnya menjaga dan meningkatkan independensi serta komitmen auditor dalam rangka mencapai kinerja yang optimal.
- Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menyusun program pelatihan serta pembinaan yang lebih efektif bagi auditor pemerintah, terutama dalam menjaga etika dan profesionalisme.

Manfaat bagi Masyarakat :

- Jika kinerja auditor pemerintah meningkat, maka proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara atau daerah dapat lebih efektif, sehingga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

- Dengan audit yang lebih baik, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan kebijakan publik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Donny Indra (2016)	Pengaruh Independensi, dan Komitmen Organisasi, Terhadap Kinerja Auditor Pemerintahan (Studi pada auditor pemerintah di BPKP Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor dan komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja auditor.
2.	Pingkan Kayana (2023)	Pengaruh pengalaman, Independensi, Kompetensi, Skeptisme profesional auditor, dan tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan (studi	Kuantitatif	Hasil Penelitian ini adalah Pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan,

		kasus di BPKP Provinsi Sumatera Selatan)		kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dan tekanan waktu berpengaruh terhadap peneteksian kecurangan.
3.	Saputro Nugroho Widhi (2014)	Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komiten Organisasi dan Pemahaman <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (studi empiris pada kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah)	Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi tidak berpengaruh positif pada kinerja auditor pemerintah. Hasil tes simultan independensi, omitmen organisasi tidak berpengaruh pada kinerja auditor pemerintah kolektif. Hanya variable <i>Good Governance</i> yang berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintahan.

4.	<p>Yuliana Eva, Retno Wulandari, Mochamad Fariz Irianto (2021)</p>	<p>Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi, Struktur Audit dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada KAP di Kota Malang)</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di KAP Kota Malang. Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di KAP Kota Malang. Variabel struktur audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di KAP Kota Malang. Variabel motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di KAP Kota Malang. Secara simultan variabel independensi, komitmen organisasi, struktur audit dan</p>
----	--	---	--------------------	--

			Motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor di KAP Kota Malang.
5.	Listiya Nuraini (2017)	Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor (Studi empiris pada Kantor Akuntan Publik Yogyakarta dan Solo)	Kuantitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yang juga meneliti Pengaruh independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Secara umum, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa independensi dan komitmen organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut, di mana semakin tinggi tingkat independensi dan komitmen organisasi, maka semakin baik pula kinerja auditor. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat bukti empiris yang telah ada dan menegaskan bahwa kedua faktor tersebut merupakan aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas kerja auditor, khususnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, sementara penelitian sebelumnya mungkin dilakukan di instansi atau wilayah yang berbeda. Selain itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu independensi dan komitmen organisasi, mungkin belum dikombinasikan secara spesifik dalam penelitian terdahulu, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami faktor yang memengaruhi kinerja auditor. Perbedaan lainnya dapat ditemukan dalam metode analisis dan periode penelitian, yang dapat menghasilkan temuan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi terkini di lingkungan BPKP Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi adalah teori yang mengkaji tentang perilaku seseorang. Fritz Heider dalam Arfan (2010:90) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, karakter, sikap, kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu, kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Perilaku auditor dipengaruhi *internal forces* dan *external forces* merupakan dasar terbentuknya perilaku auditor dalam bertindak dalam pelaksanaan tugas maupun dalam menghadapi situasi sehingga dapat tercapainya kinerja auditor itu sendiri.

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (dalam Purnaditya dan Rohman 2015) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- **Kekhususan.** Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
- **Konsensus.** Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- **Konsistensi.** Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Menurut Luthans (dalam Mindarti 2015) Teori atribusi akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik individu auditor terhadap kinerja auditor. Teori ini menyatakan mengenai bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Penyebab seseorang memilih suatu perilaku bisa berasal dari internal (*dispositional attributions*) dan eksternal

(situational attributions). Penyebab internal cenderung mengarah pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih mengarah pada lingkungan yang memengaruhi perilaku seseorang seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, tindakan seorang auditor dalam melaksanakan penugasan audit sesuai dengan prosedur sehingga kinerjanya maksimal dapat disebabkan oleh faktor internal individu yang bersangkutan maupun faktor lingkungan.

Dalam penelitian ini, teori atribusi dipilih untuk menganalisis pengaruh independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah. Karena independensi auditor, sebagai faktor internal, yang berperan krusial dalam menentukan kualitas dan objektivitas hasil audit. Dengan memahami bagaimana auditor mendapatkan keberhasilan atau kegagalan mereka pada faktor-faktor internal seperti kompetensi dan sikap profesional, kita dapat lebih baik memahami dinamika yang mempengaruhi kinerja mereka. Sedangkan dalam komitmen organisasi Auditor yang memiliki tingkat komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung menunjukkan dedikasi yang lebih besar dalam pekerjaan mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja. Teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana komitmen ini mempengaruhi persepsi auditor terhadap tanggung jawab mereka dan motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana auditor menginterpretasikan dan menjelaskan penyebab dari perilaku mereka sendiri serta kinerja yang dihasilkan.

2.2 Independensi

2.2.1 Definisi Independensi

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Berdasarkan Asosiasi Audit Intern Pemerintah (2021), independensi diartikan sebagai situasi di mana tidak ada kondisi yang mengancam objektivitas APIP dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk berada pada tingkat independensi yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan intern, pimpinan APIP harus memiliki akses langsung tanpa batasan kepada Pimpinan Daerah. Potensi ancaman terhadap independensi perlu dikelola di berbagai tingkatan: individu auditor, penugasan, fungsional juga organisasi. APIP yang menjalankan tugas asurans dan konsultasi harus terbebas dari intervensi dalam penetapan cakupan, pelaksanaan tugas, dan pelaporan hasil.

Independensi menurut Mulyadi (dalam Safitri 2014) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak terganggu pada orang lain. Independensi biasanya dikarakteristikkan dengan menekankan pemisahan atau otonomi kepentingan seorang individu dengan suatu entitas. Independensi berarti bahwa auditor harus objektif dan tidak bias. Auditor tidak menyandarkan penilaiannya berdasarkan tekanan dari pihak lain dan menghindari hubungan yang akan muncul kepada orang lain yang dapat

berakibat munculnya konflik kepentingan Vanasco (dalam Istiariani,2018) Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Menurut Nugrahaeni, dkk (2018) independensi merupakan suatu sikap auditor yang tidak memihak kepada siapa pun dalam melaksanakan pemeriksaan, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Kode Etik Akuntan tahun 2020 menyebutkan bahwa independensi adalah independensi pemikiran. Independensi dalam pemikiran berarti sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.

Carey dalam Mautz (dalam Trisnaningsih, 2007) mendefinisikan independensi akuntan publik dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan. Independensi meliputi:

- Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional.
- Merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Independensi merupakan sikap seseorang yang bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari orang lain. Independensi Auditor yaitu adanya kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya pada saat menjalankan tugasnya.

2.2.2 Indikator Independensi Auditor

Menurut Ely Suhayati (2021:64) terdapat 2 indikator dalam independensi auditor, yaitu:

1. Tidak Mudah Dipengaruhi Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus bersikap jujur dengan tidak terpengaruh dan bebas dari usaha pihak lain sehingga dapat mengungkapkan pendapat dengan apa adanya.
2. Tidak Memihak Pada Kepentingan Siapapun Auditor harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Auditor akan dianggap tidak independen jika auditor tersebut memiliki hubungan (misalnya keluarga) dengan kliennya karena dapat menimbulkan kecurigaan dikarenakan akan memihak kliennya.

2.2.3 Aspek Independensi

Agoes. S (2004:1) mengklasifikasikan aspek independensi seorang auditor menjadi 3 aspek yaitu :

- Independensi senyatanya (*independent in fact*), yaitu suatu keadaan di mana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara obyektif.
- Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*), yaitu pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
- Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (*independent in competence*), hal ini berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

2.2.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi Independensi

Elder, Beasley, Arens dan jusuf (2011:75) menyatakan bahwa ada lima yang mempengaruhi independensi, yaitu:

- Kepemilikan finansial yang Signifikan
Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misal pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien.
- Pemberian Jasa Non-Audit
Konflik kepentingan yang paling nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.
- Imbalan jasa Non-Audit dan Independensi
Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.
- Tindakan hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan kliennya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa-jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.
- Pergantian auditor
Riset dibidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, opinion shopping, dan mengurangi biaya.

2.3 Komitmen Organisasi

2.3.1 Definisi Komitmen Organisasi

Menurut Kasmir (2018) menyatakan bahwa komitmen merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja. Menurut Amilin dan Dewi (2008) Komitmen organisasi adalah loyalitas auditor terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi. Auditor yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, Auditor akan memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi (Istiqomah, 2003). Menurut Luthans (2006) komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas pegawai pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Menurut Meyer, Allen, & Smith (dalam Suseno,2010) komitmen organisasi merupakan kelekatan emosi, identifikasi, dan keterlibatan karyawan dalam perusahaan, serta keinginan untuk tetap menjadi anggota perusahaan. Komitmen terhadap organisasi dalam tiga komponen yang berbeda yaitu komitmen sebagai kelekatan afeksi kepada organisasi, komitmen dipandang sebagai biaya yang timbul jika meninggalkan organisasi, dan komitmen sebagai kewajiban untuk tetap berada dalam organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi mengandung elemen keinginan, kebutuhan, dan

kewajiban. Sementara Robbins (2001) mengemukakan bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seseorang karyawan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari dalam diri seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi adalah Tingkat keterkaitan,loyalitas dan dedikasi seorang anggota terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen ini mencerminkan sejauh mana seseorang bersedia berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatannya.

2.3.2 Dimensi Komitmen Organisasi

Robbins dan Timothy (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi komitmen organisasi yaitu :

1. Komitmen Afektif, Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
2. Komitmen Normatif, Kewajiban untuk beratahan dengan organisasi untuk alasan moral atau etis.
3. Komitmen Berkelanjutan, Nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

2.3.3 Faktor – faktor Komitmen Organisasi

Menurut Steers (dalam Yusuf & Syarif 2018) mengelompokkan komitmen organisasi menjadi tiga faktor:

1. Identifikasi dengan organisasi yaitu penerimaan tujuan organisasi, dimana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. Identifikasi pegawai tampak melalui sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai

pribadi dan nilai-nilai organisasi, rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.

2. Keterlibatan yaitu adanya kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh pada organisasi. Keterlibatan sesuai peran dan tanggungjawab pekerjaan di organisasi tersebut. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan padanya.
3. Loyalitas yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan di dalam organisasi. Loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen, serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara organisasi dengan pegawai. Pegawai dengan komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi.

2.4 Kinerja Auditor

2.4.1 Definisi Kinerja Auditor

Menurut Mulyadi (2002: 11) kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja auditor adalah auditor- auditor yang telah melakukan penugasan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu organisasi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU). Kinerja dibedakan menjadi dua yaitu : kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas dan kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan antara kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara 2005: 15).

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mahsun dkk. 2007). Sedangkan Menurut Robbin (2001), kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama, pengertian kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai individu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Setiap suatu organisasi atau perusahaan dituntut untuk memiliki auditor yang berkualitas, untuk membuat organisasi maju dan berkembang. Auditor yang berkualitas adalah auditor yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh organisasi (Ayu, 2017). Suatu organisasi memerlukan penerapan kinerja untuk memperoleh auditor yang memiliki kinerja baik. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja seseorang yang menggambarkan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Menurut Sitio dkk (2014), kinerja auditor merupakan hasil kerja auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab auditor itu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor merupakan auditor yang telah melaksanakan tindakan atau tugas pemeriksaan secara objektif dan efisien atas laporan keuangan suatu organisasi yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

2.4.2 Faktor – faktor Kinerja Auditor

Menurut Henry Simamora (2004) faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran kinerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu:

1. Kuantitas kerja, merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar atau ditetapkan oleh perusahaan.
2. Kualitas kerja, merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh pegawai dalam hal ini merupakan suatu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output.

2.5 Hubungan Teori Atribusi dengan Independensi dan Komitmen Organisasi

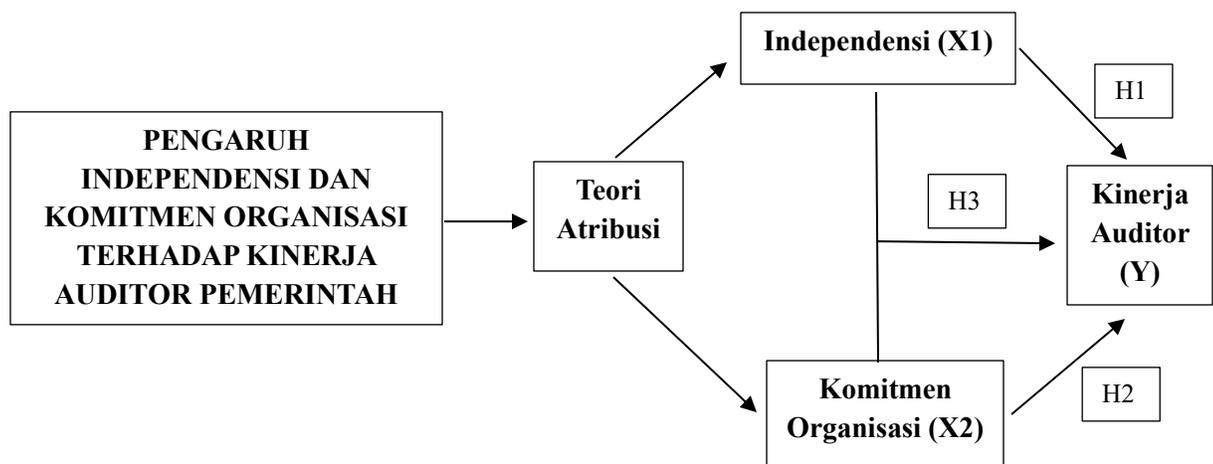
Teori atribusi adalah teori yang mengkaji tentang perilaku seseorang. Fritz Heider dalam Arfan (2010:90) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, karakter, sikap, kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu, kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Teori atribusi memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana individu menjelaskan penyebab dari perilaku atau peristiwa yang mereka alami. Dalam konteks auditor, teori ini membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas mereka. Independensi auditor, yang mencakup kemampuan untuk bersikap objektif

dan bebas dari pengaruh pihak eksternal, sangat relevan dalam teori atribusi. Auditor yang memiliki independensi tinggi cenderung membuat atribusi internal, yaitu memandang hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi yang berasal dari kompetensi dan integritas mereka. Auditor yang mampu menjaga independensinya akan lebih cenderung menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi. Lalu Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana auditor merasa terikat dan terlibat dengan instansi tempat mereka bekerja. Auditor dengan komitmen yang tinggi cenderung berusaha untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk memberikan layanan audit berkualitas. Auditor dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung memandang tantangan dalam pekerjaan sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja. Mereka lebih mungkin membuat atribusi eksternal yang positif, seperti mengaitkan dukungan organisasi sebagai faktor yang mendukung keberhasilan pekerjaan mereka, yang pada gilirannya memperkuat motivasi mereka untuk berprestasi. Kinerja auditor dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut yaitu independensi dan komitmen organisasi. Auditor yang memiliki sikap independen tidak hanya dapat memberikan hasil audit yang lebih baik tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi. Ketika independensi dan komitmen organisasi berjalan seiring, auditor memiliki landasan yang kuat untuk mencapai kinerja optimal. Dalam perspektif teori atribusi, perpaduan ini memungkinkan auditor untuk menyeimbangkan atribusi internal dan eksternal secara efektif, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas dan beretika. Hubungan ini menunjukkan bahwa teori atribusi dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami dinamika psikologis yang memengaruhi kualitas kinerja auditor.

2.6 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2019) dalam bukunya menyebutkan bahwa kerangka pikir dalam suatu penelitian diperlukan agar penelitian tersebut dapat tersusun secara sistematis. Secara umum, kerangka pikir digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Kerangka pikir merupakan model konseptual yang memuat bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Auditor yang memiliki Independensi yang tinggi cenderung menghasilkan kualitas audit yang sangat baik, dan sangat mempengaruhi kinerjanya menjadi lebih baik, Begitu pula dengan komitmen organisasi, auditor yang berkomitmen akan lebih termotivasi untuk melakukan tugas tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan kerangka berpikir sebagai berikut :



2.7 Hipotesis Penelitian

H1 : Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah.

H2 : Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah.

H3 : Independensi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Independensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Analisis data menggunakan data data angka yang diolah dengan metode statistika, setelah diperoleh hasilnya kemudian dideskripsikan dengan menguraikan kesimpulan yang didasari oleh angka yang telah diolah dengan metode statistika tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No.33, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada tahun 2024-2025

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua macam variabel yang diteliti yaitu variabel independent (variabel bebas) dan variabel dependent (variabel terikat). Menurut Haqul dalam Nasution (2017), variabel penelitian dapat dilihat dari segi perannya, variabel dapat dibedakan kedalam dua jenis yaitu:

- a) Variabel independent (variabel bebas) ialah variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Independensi dan Komitmen Organisasi Sebagai (X)
- b) Variabel dependent (variabel terikat) ialah variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Auditor Sebagai (Y).

3.4 Populasi

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang berjumlah 83 orang. Berikut ini adalah data Jumlah Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Tabel 3 Data Jumlah Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

No	Bidang	Jumlah
1.	Instansi Pemerintah Pusat (IPP)	18
2.	Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)	17
3.	Akuntan Negara (AN)	17
4.	Investigasi	16
5.	Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	15
Total Auditor		83

Data diolah : 2025

Berdasarkan tabel di atas Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor BPKP Provinsi Lampung yang berjumlah 83 orang, dengan kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Responden merupakan seorang auditor
2. Sudah menjadi auditor kurang lebih 1 tahun.

3.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemahaman atau makna dari suatu konsep yang digunakan dalam penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Independensi** adalah sikap di mana seseorang, kelompok, atau Lembaga bertindak secara mandiri tanpa pengaruh, tekanan atau campur tangan orang lain. Independensi sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat Keputusan yang obyektif dan bebas dari tekanan atau kepentingan eksternal.

2. **Komitmen Organisasi** adalah Tingkat keterkaitan,loyalitas dan dedikasi seorang anggota terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen ini mencerminkan sejauh mana seseorang bersedia berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatannya.
3. **Kinerja Auditor** adalah efektivitas dan efesiensi auditor dalam melaksanakan tugas audit,yaitu proses pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap sistem keuangan atau operasional suatu organisasi. Kinerja auditor kinerja auditor merupakan auditor yang telah melaksanakan tindakan atau tugas pemeriksaan secara objektif dan efisien atas laporan keuangan suatu organisasi yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

3.5.2 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2019), definisi operasional merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel 4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Independensi (X1)	Independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak terganggu pada orang lain. Independensi biasanya dikarakteristikan dengan menekankan pemisahan atau otonomi kepentingan seorang individu dengan suatu entitas. (Mulyadi, dalam Safitri 2014)	1. Sikap jujur Adalah perilaku yang mencerminkan keterbukaan dan kejujuran dalam berucap dan bertindak. Seseorang yang jujur akan mengatakan sesuai dengan kebenaran yang terjadi serta bertindak sesuai dengan napa yang

Komitmen Organisasi (X2)	<p>Komitmen Organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan</p>	<p>mereka katakana atau Yakini.</p>
		<p>2. Tidak memihak adalah sikap atau prinsip di mana seseorang atau suatu pihak tidak menunjukkan keberpihakan atau kesetiaan kepada salah satu pihak. Sikap ini menekankan netralitas dan ketidakberpihakan dalam membuat keputusan, memberikan penilaian, atau bertindak dalam situasi tertentu, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan eksternal, atau hubungan emosional.</p>
		<p>1. Loyalitas adalah kesetiaan dan komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan menunjukkan keterikatan yang kuat</p>

organisasi. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas pegawai pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. (Luthans, 2006)

dengan tujuan, nilai, dan visi organisasi, serta bersedia berkontribusi demi kesuksesan mewujudkan tujuan-tujuan organisasinya.

2. Nilai-nilai Organisasi

adalah prinsip-prinsip, keyakinan, dan panduan moral yang dianut dan diterapkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan operasional serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kinerja Auditor (Y)

Kinerja Auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja auditor adalah auditor-auditor yang telah melakukan penugasan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu organisasi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan

1. **Kualitas** merujuk pada sejauh mana auditor dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memastikan bahwa laporan keuangan dan proses audit memenuhi standar yang ditetapkan. Kualitas kinerja auditor sangat penting, karena

keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU). (Mulyadi 2022)

dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan dan hasil audit.

2. **Kuantitas** mengacu pada ukuran atau jumlah hasil yang dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks auditing, kuantitas dapat diukur melalui beberapa aspek, termasuk jumlah audit yang diselesaikan, jumlah temuan atau rekomendasi yang dihasilkan, serta waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan audit.

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan berasal dari informasi yang sudah tersedia sebelumnya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal penelitian, internet, dan artikel lain yang relevan dengan topik penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan Kuisisioner kepada responden yang telah ditentukan kriterianya. Menurut Sugiyono (2019), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode yang efisien ketika peneliti sudah memahami dengan jelas variabel yang akan diukur dan informasi yang dibutuhkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka, yang dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner online melalui Google Form.

3.7.1 Skala Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2021) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala model likert. Skala model likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono

(2017), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, kuesioner dibuat dengan menggunakan skala 1-5. Adapun arti dari setiap skala tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Pengukuran Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Nilai
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono 2017

3.8 Uji Prasyarat Instrumen

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017), uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, jika instrumen kurang valid maka mempunyai validitas yang rendah. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuesioner akan dianggap valid ketika pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Product Moment sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variable x dan y

N = Jumlah subjek

$\sum xy$ = Jumlah dari hasil kali nilai X dan Y

$\sum X$ = Jumlah nilai X

$\sum Y$ = Jumlah nilai Y

$\sum X^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai X

$\sum Y^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai Y

Selanjutnya Selanjutnya untuk menentukan valid atau tidaknya data tersebut dilakukan pengecekan dengan kriteria sebagai berikut.

1. Jika r hitung $>$ r tabel, maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi tanggapan terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Menurut Ghozali (2011), reliabilitas adalah alat untuk mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner merupakan indikator variabel. Adapun rumus Cronbach's Alpha adalah sebagai berikut.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Koefisien reliabilitas instrumen

K = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma^2 b$ = Jumlah varian butir

$\sigma^2 t$ = Varian total antara 0.08 sampai dengan 0,1

Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,6 (Ghozali, 2011). Berikut kriteria dalam rumus Cronbach's Alpha yang lebih spesifik.

1. Jika nilai Alpha Cronbach 0,00 – 0,20, maka tidak reliabel
2. Jika nilai Alpha Cronbach 0,21 – 0,40, maka kurang reliabel
3. Jika nilai Alpha Cronbach 0,41 – 0,60, maka cukup reliabel
4. Jika nilai Alpha Cronbach 0,61 – 0,80, maka reliabel
5. Jika nilai Alpha Cronbach 0,81 – 1,00, maka sangat reliabel

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Dalam statistik deskriptif, dapat dilakukan pencarian kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, dan konsisten. Data akan diolah dengan menggunakan beberapa uji, yaitu sebagai berikut:

3.9.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak (Haniah, 2014). Uji normalitas yang akan digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai sig, $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai sig, $< 0,05$ maka nilai residual tidak terdistribusi secara normal.

3.9.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menguji adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen, dapat dilakukan dengan menggunakan tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Asumsi dari nilai tolerance dan VIF dinyatakan sebagai berikut.

1. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas.
2. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

menggunakan analisis grafik scatterplot. Adapun dasar pengambilan keputusan pada analisis grafik scatterplot adalah sebagai berikut.

1. Jika terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka menandakan bahwa terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu Y, maka menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji hipotesis melalui analisis linier berganda (multiple), adalah untuk mencari pengaruh Independensi (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) terhadap kinerja auditor (Y).

3.9.4 Uji Hipotesis

3.9.4.1 Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen (Widjarjono, 2010). Menggunakan rumus Korelasi Uji t untuk mengetahui pengaruh antara variabel X1 terhadap Y yaitu antara variabel Independensi (X1) terhadap Kinerja Auditor (Y) dan X2 terhadap Y yaitu antara variabel Komitmen Organisasi (X1) terhadap Kinerja Auditor (Y). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t table dengan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut.

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Uji pengaruh parsial

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya data

Berikut merupakan kriteria yang digunakan dengan tingkat signifikansi 5%.

1. Jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

3.9.4.2 Uji F (Simultan)

Menurut Sugiyono (2017), uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menggunakan rumus Korelasi Uji F (simultan) digunakan untuk mencari korelasi atau kesignifikanan pengaruh secara bersama sama antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y yang akan diuji dengan rumus sebagai berikut.

$$f_{hitung} = \frac{R^2/k}{(n - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima
- b. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak
- c. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima
- d. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_o ditolak

3.9.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R²) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen menerangkan/menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika koefisien determinasi (R²) semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan variabel independen terbatas dalam menerangkan/menjelaskan variabel dependen. Untuk menentukan seberapa besar nilai R atau korelasi antar variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat memperhatikan kriteria koefisien korelasi sebagai berikut.

Tabel 6 Kriteria Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1.	0,000-0,199	Sangat Rendah
2.	0,200-0,399	Rendah
3.	0,400-0,599	Sedang
4.	0,600-0,799	Kuat
5.	0,800-1000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono 2019

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan *besluit* Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountantsdienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah,

dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada masa reformasi ini BPKP

banyak mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai *good governance*.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

- A. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
- B. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
- C. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- D. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;

- E. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
- F. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
- G. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- H. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
- I. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

4.2 Pengertian BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas keuangan negara. Didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pengawasan keuangan, BPKP bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di berbagai tingkatan. Melalui berbagai kegiatan seperti audit, evaluasi, dan investigasi, BPKP memastikan penggunaan keuangan negara secara efektif, efisien, dan akuntabel. Lingkup pengawasan BPKP sangat luas, mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga pembangunan nasional. Dengan demikian, BPKP berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya penyimpangan serta kerugian negara. Tujuan utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Melalui berbagai kegiatan pengawasan seperti audit, evaluasi, dan investigasi, BPKP berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara. Lingkup pengawasan BPKP mencakup berbagai sektor, mulai dari pusat hingga daerah, serta berbagai aspek pembangunan nasional. Dengan

demikian, BPKP berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

4.3 Visi, Misi dan Tujuan BPKP

a. Visi

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

b. Misi

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

c. Tujuan

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024, yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel, dan Sehat.

4.4 Tugas dan Fungsi BPKP

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

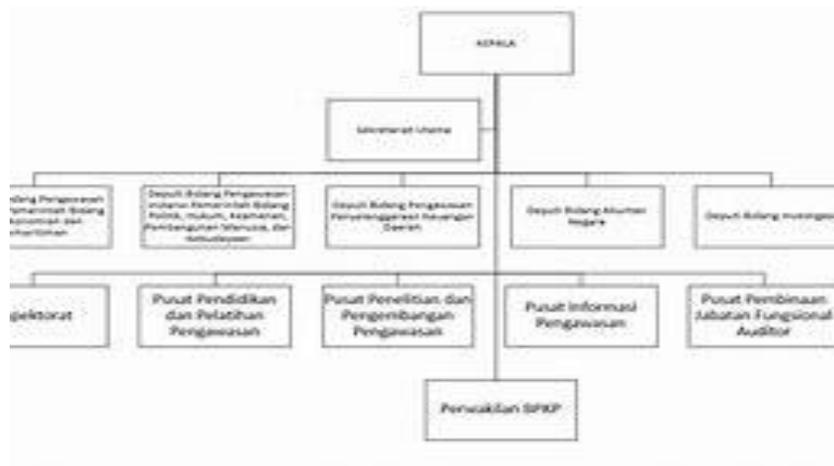
bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.
7. Pelaksanaan revidu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP.
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

4.5 Struktur Organisasi BPKP



Gambar 1 Struktur Organisasi BPKP

4.5.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung



Gambar 2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Adapun tujuan dan peran masing-masing jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan merupakan Pimpinan tertinggi di Tingkat perwakilan, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
2. Kepala Bagian Umum membantu Kepala Perwakilan dalam mengelola Administrasi, Keuangan, Kepegawaian dan Aset.
3. Koordinator Pengawasan memimpin Tim Pengawasan dalam berbagai bidang seperti :
 - Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) memfokuskan kepada pengawasan atas, BUMN, BUMD dan Lembaga Pemerintah Pusat lainnya.
 - Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) memfokuskan pada pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Bidang Pengawasan Akuntan Negara (AN) memfokuskan pada pengawasan penerapan Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Bidang Pengawasan Investigasi melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan atau tindak pidana korupsi
- Bidang Pengawasan Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3APIP) memfasilitasi pengembangan dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Lampung, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel independensi (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor (Y). Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki auditor, semakin baik pula kinerjanya dalam menjalankan tugas audit. Independensi yang terjaga memungkinkan auditor untuk bersikap objektif, profesional, dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi hasil audit.
2. Variabel komitmen organisasi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor (Y). Hasil ini membuktikan bahwa auditor yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Rasa memiliki dan keterikatan terhadap organisasi menjadi faktor penting yang mendorong auditor untuk bekerja dengan dedikasi tinggi serta menjaga integritas dalam proses audit.
3. Variabel independensi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hasil ini membuktikan bahwa kombinasi antara independensi yang kuat dan komitmen organisasi yang tinggi menghasilkan auditor yang lebih efektif, profesional, serta mampu menjaga kualitas audit yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dan

komitmen organisasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja auditor di lingkungan BPKP Provinsi Lampung.

6.2 Saran

Setelah mengetahui besarnya pengaruh independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor di perwakilan BPKP Provinsi Lampung, maka saran yang dapat peneliti rekomendasikan yakni sebagai berikut.

1. Mempertahankan independensi auditor dengan cara BPKP dapat memperketat penerapan kode etik auditor serta regulasi yang memastikan independensi auditor dalam menjalankan tugasnya dan juga menerapkan standar audit berbasis teknologi yang memastikan hasil audit lebih objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.
2. Memperkuat komitmen organisasi dengan cara meningkatkan keterlibatan auditor dalam pengambilan keputusan, dan juga membangun budaya organisasi yang kuat seperti : menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai integritas.
3. Untuk mencapai kinerja yang baik auditor harus menjaga independensi dan objektivitas, meningkatkan kompetensi dan keahlian, menerapkan prinsip integritas dan profesionalisme, meningkatkan kemampuan komunikasi dengan menerapkan langkah-langkah ini, auditor dapat mencapai kinerja yang lebih baik, meningkatkan kualitas audit, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja auditor, seperti pengalaman kerja, kompetensi profesional, atau berdasarkan lamanya bekerja. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan responden dari auditor perwakilan BPKP lain atau memperluas cakupan wilayah agar dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Amilin dan Rosita Dewi. 2008. “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dengan Role Stress Sebagai Variabel Moderating”. *JAAI*, Vol 12 No 1.
- Arens, et al. 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Terjemahan Amir Abdi Jusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifah, Nurul. 2012. *Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Asosiasi Audit Intern Pemerintah. 2021. Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah.
- Ayu, Esthi. (2017). “Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pada BPKP Provinsi Sulawesi Barat”. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Efendy, Muh Taufiq. 2010. “*Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*”. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Eva, Y., Wulandari, R., & Irianto, M. F. 2021. “Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi, Struktur Audit Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada KAP di Kota Malang)”. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2).
- Ferdiansyah, R. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan audit pemerintah (Studi empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 109-121.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istiariani, I. 2018. “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)”. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 63-88.
- Kasmir. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rajawali Press, Depok.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk) Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
- Mahsun, Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mindarti, C. S. (2015). Pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja auditor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(3), 59-74.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Nirmala, R. P. A., & Cahyonowati, N. 2013. “Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, dan Time Budget

Pressure Terhadap Kualitas Audit". Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Nugraheni, Arfenta. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Vol.5, No.2 Agustus 2018. Page 2227. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6808>.

Nuraini, L. 2017. "Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Yogyakarta dan Solo)". *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(2).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah,

Prajitno, Sugiarto 2012. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Akuntan Publik Di Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 14, No. 3, Desember 2012, Hlm 181-192.

Pratama, D. I. (2016). Pengaruh Independensi, Dan Komitmen Organisasi, Terhadap Kinerja Auditor Pemerintahan (Studi Pada Auditor Pemerintah di BPKP Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Purba, Desi Hamidarwaty. 2009. "Analisis Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta". *Skripsi*. Uninersitas Muhammdayah Surakarta.

Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). *Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada*

WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Ritonga, H. Rahmansyah. 2013. *Optimalisasi Audit Kinerja Instansi Pemerintah*.
<http://sumut.kemenag.go.id>.

Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*. Edisi 8. Prentice Hall, Jakarta.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Edisi Keduabelas. Jakarta: Salemba Empat.

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Sitio, Ristina dan Anisykurlillah, Indah. 2014. “Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang)”. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No.3.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. 2021. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suhayati, Elly. 2021 . *Auditing : Teori dan Praktik Dasar Pemeriksaan Akuntan Publik*. Bandung. Rekayasa Sains

Sujana, Edy. 2012 “Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesekuensi Peran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung Dan Buleleng)”. Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha.

- Suseno, M. N. M. 2010. "Pengaruh Dukungan Sosial dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasi dengan Mediator Motivasi Kerja". *Jurnal Psikologi*, 37(1), 94-109.
- Wati dkk (2010). "Pengaruh Independensi Auditor, Gaya kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance". (*Studi Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu*). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Widhi, S. N. (2014). *Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris pada Kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widjarjono. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. UPP STIM YKPN.
- Yanhari. (2007). *Analisis Profesionalisme dan Etika Profesi Auditor terhadap kinerja Auditor (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Mercubuana. Jakarta.
- Yusuf, R. M., & Syarif, D. 2018. *Komitmen Organisasi*. Nas Media Pustaka.